

**LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO  
TAHUN 2024**



**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko organisasi termasuk adanya kegiatan indentifikasi, perencanaan, startegi, dan penilaian hal-hal negatif yang dapat terjadi. Penerapan manajemen risiko berpedoman pada konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen. Proses atau fungsi manajemen resiko sering diterjemahkan dalam tiga langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen resiko diharapkan dapat membuat organisasi menjadi sadar resiko dan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan dengan tujuan agar organisasi dapat mengambil keputusan yang tepat dan optimal. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko, sehingga Organisasi Perangkat Daerah diharapkan mampu mengidentifikasi penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana kegiatan.

Oleh karena itu diperlukan penilaian atas resiko yang dimiliki sehingga dapat ditentukan tindakan preventif dan solutif terhadap resiko yang akan dihadapi sesuai dengan skala penilaian risiko.

### **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan penyusunan laporan penilaian risiko tahun 2024 bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang membutuhkan solusi/rekomendasi kepada unit kepatuhan sebagai sarana pemilik risiko dalam mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah.

#### D. RUANG LINGKUP

Kegiatan Penilaian Risiko tahun 2024 di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan untuk mengetahui skala dampak dan intensitas terjadinya risiko yang sudah disusun terhadap pencapaian tugas dan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

## **BAB II**

### **PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN**

#### **A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan selaku unsur pelaksana urusan pendapatan daerah di Kabupaten Lamongan telah menyusun register risiko OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah. Adapun risiko yang telah berhasil dikategorikan menjadi 2 yaitu risiko strategis dan operasional. Kondisi lingkungan pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2024 berdasarkan pada dokumen hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern dapat dikategorikan memiliki nilai “memadai” sebagaimana tabel di bawah ini :

[illegible]

# 2024

[illegible]

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN  
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)  
Pemerintah Kabupaten Lamongan  
2024

Pemda :  
Badan Pendapatan Daerah

3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	4	Memadai
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (cascading)	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	Memadai

# 2024

Pemda :  
Badan Pendapatan Daerah

[illegible]



REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN  
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)  
Pemerintah Kabupaten Lamongan  
2024

Pemda :  
Badan Pendapatan Daerah

2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																																		Memadai			
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	2	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	2	4	4	4	3	4	4	3	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	Memadai
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	Memadai

## CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

**Pemerintah Kabupaten Lamongan**

Pemda :  
Badan Pendapatan Daerah

[illegible]

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN  
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)  
Pemerintah Kabupaten Lamongan  
2024

Pemda :  
Badan Pendapatan Daerah

4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	Memadai
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																																		Memadai			
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	4	2	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	Memadai

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan mitigasi risiko memiliki beberapa kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai sebagaimana berikut :

- 1. Sudah terdapat kode etik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan, namun perlu disesuaikan kembali dengan regulasi terbaru yakni Perbup Lamongan No. 39 Tahun 2021 tentang Kode Etik.
- 2. Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi pegawai, namun tingkat kehadirannya belum 100%.
- 3. Adanya rapat internal yang diselenggarakan secara rutin setiap hari senin dan telah tercipta budaya kerja yang kondusif, namun demikian masih perlu untuk terus ditingkatkan.
- 4. Struktur organisasi telah disusun selaras dengan proses bisnis organisasi, namun belum sampai ke tingkat SOP.
- 5. Sudah ada pendelegasian wewenang dan tanggungjawab secara tepat, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- 6. Sudah terdapat penyusunan dan penerapan kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap beserta *reward* dan *punishment* nya.
- 7. Tim SPIP telah terbentuk, namun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya.
- 8. Sudah terjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait, namun masih perlu ditingkatkan lagi hubungan kerja samanya.

Guna mengatasi lingkungan pengendalian yang kurang memadai di atas maka diperlukan beberapa strategi rencana tindak pengendalian perbaikan terhadap lingkungan pengendalian sebagaimana tabel sebagai berikut :

Formulir Kertas Kerja				
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan				
No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
1	Sudah terdapat kode etik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan, namun perlu disesuaikan kembali dengan regulasi terbaru yakni Perbup Lamongan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Kode Etik.	Peninjauan regulasi kode etik yang sudah ada dengan regulasi terbaru dan penegakan integritas dan nilai etika lebih dimasifkan	Kepala Badan	Desember
2	Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi pegawai, namun tingkat kehadirannya belum 100%.	Meningkatkan partisipasi pegawai dengan sistem reward dan punishment serta penekanan tujuan bimtek	Sekretaris	Maret
3	Adanya rapat internal yang diselenggarakan secara rutin setiap hari senin dan telah tercipta budaya kerja yang kondusif. Namun demikian masih perlu untuk terus ditingkatkan .	Rapat internal dilaksanakan secara terstruktur dan dikemas dalam coffe morning agar tidak bosan	Kepala Badan	Setiap minggu
4	Struktur organisasi telah disusun selaras dengan proses bisnis organisasi, namun belum sampai ke tingkat SOP.	Pembuatan SOP	Sekretaris, Kepala Bidang	Desember
5	Sudah ada pendelegasian wewenang dan tanggungjawab secara tepat, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.	Dilaksanakan movev secara berkala dan pemberian reward dan punishment	Kepala Badan	Januari-Desember
6	Sudah terdapat penyusunan dan penerapan kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap beserta reward dan punishment nya.	Perlu diadakan evaluasi pengelolaan SDM setiap bulannya	Kepala Badan	Januari-Desember
7	Tim SPIP telah terbentuk, namun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya.	Diadakan bimtek SPIP untuk peningkatan efektivitas	Kepala Badan	Setiap triwulan
8	Sudah terjalin kerja sama yang baik dengan instansi terkait, namun masih perlu ditingkatkan lagi hubungan kerja samanya.	Meningkatkan kerja sama dan hubungan yang profesional dengan instansi terkait	Kepala Badan	Januari-Desember

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Tujuan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan selaras dengan tujuan dalam RPJMD Kabupaten lamongan, dimana di dalam RPJMD Kabupaten Lamongan memiliki tujuan yaitu *”Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa”*. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah untuk meningkatnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Oleh karena itu guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran jangka menengah yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, yang selaras dan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Lamongan yang dibagi menjadi 2 sasaran yaitu :

- 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2. Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Berdasarkan pada hasil analisis penyusunan register resiko, maka dapat dijabarkan bahwa Badan Pendapatan Daerah sebagai pelaksana tugas menggali dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lamongan memiliki resiko yang berhasil dianalisis yang terbagi ke dalam resiko strategis dan resiko operasional sebagaimana matriks yang disajikan sebagai berikut :

Tabel Kertas Kerja Risiko Strategis Badan Pendapatan Daerah

Kertas Kerja Strategis OPD Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan							
Nama OPD		Badan Pendapatan Daerah							
Tahun Penilaian		2024							
Periode yang Dinilai		2024							
Tujuan Strategis		Mengoptimalisasi Reformasi dan Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa							
Urusan Pemerintahan		Keuangan dan Pendapatan							
OPD yang dinilai		Badan Pendapatan Daerah							
Tujuan Strategis Pemerintah		Mengoptimalisasi Reformasi dan Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa							
Sasaran		Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah, Meningkatnya Pemberdayaan Desa							
No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Persentase Peningkatan PAD	Tidak Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	RSO.24.37.08.01	Kepala Badan	Potensi PAD Belum Tergali Secara Optimal	Internal	C	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Rebdah	Pemerintah Daerah

Tabel Kertas Kerja Risiko Operasional Badan Pendapatan Daerah

Tambah Kertas Kerja Operasional Pemda Pemerintah Kabupaten Lamongan											
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan									
Nama OPD		Badan Pendapatan Daerah									
Tahun Penilaian		2024									
Periode yang Dinilai		2024									
Tujuan Strategis											
Sasaran strategis OPD											
Urusan Pemerintahan		Keuangan dan Pendapatan									
OPD yang Dinilai		Badan Pendapatan Daerah									
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tinggi	Rendahnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	ROO.24.37.08.01	Kepala Bidang	Rendahnya Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Eksternal	C	Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tidak Tercapai	Pemerintah Daerah
2	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah yang Tersusun	Sedang	Penetapan target pajak daerah tidak sesuai dengan potensi yang ada	ROO.24.37.08.02	Kepala Bidang	Potensi pajak belum tergali secara optimal	Intenal	C	Tidak terdapat peningkatan dalam penerimaan pajak daerah	Pemerintah Daerah
3	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Analisa Potensi dan Kebijakan Pajak Daerah yang Tersusun	Sedang	Data potensi pajak daerah tidak tersusun secara akurat	ROO.24.37.08.03	Kepala Bidang	Data potensi pajak daerah tidak diupdate secara berkala	Internal	C	Data potensi pajak daerah tidak terupdate	Pemerintah Daerah
4	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Pajak Daerah yang Tersusun	Sedang	Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	ROO.24.37.08.04	Kepala Bidang	Sosialisasi yang dilaksanakan masih kurang intens	Internal	C	Kesadaran wajib pajak masih rendah	Pemerintah Daerah dan Masyarakat
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Pajak Daerah yang Tersedia	Rendah	Tidak tersedianya sarana dan prasarana pajak daerah/blanko SPTPD terlambat mengirim	ROO.24.37.08.05	Kepala Bidang	Penyedia sarana dan prasarana/ blanko SPTPD terlambat mengirim	Eksternal	C	Pelayanan Pajak Daerah terhambat	Masyarakat (wajib pajak)
6	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang Telah Didata dan Dimutakhirkan	Sedang	Database pajak daerah yang tersusun belum akurat	ROO.24.37.08.06	Kepala Bidang	Kurangnya SDM Pendataan Pajak Daerah dan terbatasnya anggaran	Internal	C	Database obyek/subyek pajak daerah tidak akurat	Pemerintah Daerah
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Obyek Pajak yang Telah Dilakukan Penilaian Baik Massal Maupun Individual	Rendah	Hasil Penilaian Objek Pajak belum menggambarkan kondisi riil di lapangan	ROO.24.37.08.07	Kepala Bidang	Tidak semua objek pajak dilakukan penilaian ke lapangan dan masih kurangnya tenaga penilai PBB	Internal	C	Obyek pajak dinilai terlalu rendah	Masyarakat (wajib pajak)
8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan yang Tersedia	Rendah	Sistem pelayanan pajak online terhambat	ROO.24.37.08.08	Kepala Bidang	Aplikasi trouble	Eksternal	C	Pelayanan Pajak Daerah terhambat	Pemerintah Daerah
9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pajak Daerah yang Tersusun	Rendah	Keterlambatan update data perkembangan penerimaan pajak daerah	ROO.24.37.08.09	Kepala Bidang	Belum adanya aplikasi yang terintegrasi dengan keuangan daerah	Intenal	C	Data perkembangan pajak daerah tidak realtime	Pemerintah Daerah
10	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penagihan Pajak Daerah yang Tersusun	Tinggi	Tidak terpenuhinya target penerimaan pajak	ROO.24.37.08.10	Kepala Bidang	Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	Eksternal	C	Target pajak daerah tidak tercapai dan meningkatnya piutang pajak daerah	Pemerintah Daerah
11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Berkas Keberatan Pajak Daerah yang terselesaikan	Sedang	Keterlambatan proses penanganan keberatan dan pengurangan	ROO.24.37.08.11	Kepala Bidang	Kurangnya SDM Penelaah Keberatan Pajak Daerah	Intenal	C	Berkas keberatan tidak segera terselesaikan	Masyarakat (wajib pajak)
12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pajak Daerah yang Tersusun	Sedang	Pelaksanaan pemeriksaan pajak terhambat	ROO.24.37.08.12	Kepala Bidang	Kurangnya SDM Pemeriksa Pajak Daerah	Internal	C	Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak ada peningkatan	Pemerintah Daerah
13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Retribusi Daerah yang Tersusun	Rendah	Keterlambatan update data perkembangan penerimaan retribusi daerah	ROO.24.37.08.13	Kepala Bidang	Masih kurangnya koordinasi dengan OPD Penghasil	Internal	C	Data perkembangan retribusi daerah tidak realtime	Pemerintah Daerah

C. Hasil Analisis Risiko

Berdasarkan pada matriks risiko strategis dan operasional di atas maka dapat dilakukan analisis terkait skala risiko yang akan dihadapi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan ke depan, adapun skala risiko serta penyebab dan dampak risiko dapat kami sajikan melalui tabel berikut :

Formulir Kertas Kerja							
Daftar Risiko Prioritas							
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian		2024					
No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Badan Pendapatan Daerah	Tidak Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	RSO.24.37.08.01	0	Kepala Badan	Potensi PAD Belum Tergali Secara Optimal	Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah Rebdah
Risiko Operasional OPD							
1	Badan Pendapatan Daerah	Rendahnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	ROO.24.37.08.01	0	Kepala Bidang	Rendahnya Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tidak Tercapai
2	Badan Pendapatan Daerah	Penetapan target pajak daerah tidak sesuai dengan potensi yang ada	ROO.24.37.08.02	0	Kepala Bidang	Potensi pajak belum tergali secara optimal	Tidak terdapat peningkatan dalam penerimaan pajak daerah
3	Badan Pendapatan Daerah	Data potensi pajak daerah tidak tersusun secara akurat	ROO.24.37.08.03	0	Kepala Bidang	Data potensi pajak daerah tidak diupdate secara berkala	Data potensi tidak up to date
4	Badan Pendapatan Daerah	Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	ROO.24.37.08.04	0	Kepala Bidang	Sosialisasi yang dilaksanakan masih kurang intens	Kesadaran wajib pajak masih rendah
5	Badan Pendapatan Daerah	Tidak tersedianya sarana dan prasarana pajak daerah/blanko SPTPD	ROO.24.37.08.05	0	Kepala Bidang	Penyedia sarana dan prasarana/ blanko SPTPD terlambat mengirim	Pelayanan Pajak Daerah terhambat
6	Badan Pendapatan Daerah	Databse pajak daerah yang tersusun belum akurat	ROO.24.37.08.06	0	Kepala Bidang	Kurangnya SDM Pendataan Pajak Daerah dan terbatasnya anggaran	Database objek/subjek pajak daerah tidak akurat
7	Badan Pendapatan Daerah	Hasil Penilaian Objek Pajak belum menggambarkan kondisi ril di lapangan	ROO.24.37.08.07	0	Kepala Bidang	Tidak semua objek pajak dilakukan penilaian ke lapangan dan masih kurangnya tenaga penilai PBB	Obyek pajak dinilai terlalu rendah
8	Badan Pendapatan Daerah	Sistem pelayanan pajak online terhambat	ROO.24.37.08.08	0	Kepala Bidang	Aplikasi trouble	Pelayanan Pajak Daerah terhambat
9	Badan Pendapatan Daerah	Keterlambatan update data perkembangan penerimaan pajak daerah	ROO.24.37.08.09	0	Kepala Bidang	Belum adanya aplikasi yang terintegrasi dengan keuangan daerah	Data perkembangan pajak daerah tidak realtime
10	Badan Pendapatan Daerah	Tidak terpenuhinya target penerimaan pajak	ROO.24.37.08.10	0	Kepala Bidang	Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	Target pajak daerah tidak tercapai dan meningkatnya piutang pajak daerah
11	Badan Pendapatan Daerah	Keterlambatan proses penanganan keberatan dan pengurangan	ROO.24.37.08.11	0	Kepala Bidang	Kurangnya SDM Penelaah Keberatan Pajak Daerah	Berkas keberatan tidak segera terselesaikan
12	Badan Pendapatan Daerah	Pelaksanaan pemeriksaan pajak terhambat	ROO.24.37.08.12	0	Kepala Bidang	Kurangnya SDM Pemeriksa Pajak Daerah	Tingkat kepatuhan wajib pajak tidak ada peningkatan
13	Badan Pendapatan Daerah	Keterlambatan update data perkembangan penerimaan retribusi daerah	ROO.24.37.08.13	0	Kepala Bidang	Masih kurangnya koordinasi dengan OPD Penghasil	Data perkembangan retribusi daerah tidak realtime

Adapun rencana tindak pengendalian ( RTP ) terhadap risiko di atas yang berisi jenis risiko, risiko, kode risiko, uraian pengendalian yang sudah ada, celah pengendalian, rencana tindak pengendalian, pemilik/penanggung jawab, serta target waktu penyelesaian risiko yang dihadapi dapat dijelaskan melalui matriks formulis kertas kerja sebagai berikut :

Formulir Kertas Kerja							
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan							
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian		2024					
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan		Keuangan dan Pendapatan					
Dinas Terkait		Badan Pendapatan Daerah					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:							
1	Tidak Tercapainya Target Pendapatan Asti Daerah (PAD)	RSO.24.37.08.01	Studi banding ke pemerintah daerah lain yang telah sukses dalam pengelolaan pendapatan daerah	Potensi SDA pemda lain dengan potensi daerah kita berbeda jadi kemungkinan penanganan pendapatan	Optimaliasi Sumber-Sumber PAD	Kepala Badan	Triwulan I (Januari-Maret 2024)





D. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan

Berikut akan dijabarkan mengenai pengendalian yang sudah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan untuk mengendalikan risiko strategis dan risiko operasional yang telah diidentifikasi dan telah dilaksanakan yang dapat kami jabarkan ke dalam matriks tabel sebagai berikut :

Formulir Kertas Kerja						
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern						
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian		2024				
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan		Keuangan dan Pendapatan				
Dinas Terkait		Badan Pendapatan Daerah				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:						
1	Optimalisasi Sumber-Sumber PAD	Rapat Koordinasi	Kepala Badan	Maret	Maret	Sudah dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan Daerah:						
1	Sosialisasi pajak dan retribusi daerah secara berkala dan monev OPD penghasil secara berkala	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sedang dilaksanakan
2	Menghitung utang potensi pajak daerah dan melakukan pendataan objek-objek pajak baru	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sedang dilaksanakan
3	Pengembangan aplikasi potensi pajak daerah	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sedang dilaksanakan
4	Peningkatan Efektivitas Penagihan dan Pemeriksaan Pajak bekerjasama dengan instansi terkait	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan dan Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sedang dilaksanakan
5	Menyusun jadwal penyediaan sarana dan prasarana secara tepat	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Setiap Triwulan	Setiap Triwulan	Sedang dilaksanakan
6	Mengoptimalkan penyerapan anggaran dan mengusulkan penambahan tenaga teknis pendataan pajak daerah	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Sekretaris	Oktober	Oktober	Sedang dan akan dilaksanakan
7	Mengusulkan penambahan tenaga teknis Penilai PBB	Surat Menyurat	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Juli	Juli	Sudah dilaksanakan
8	Melakukan backup data pajak daerah	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sedang dilaksanakan
9	Pengembangan aplikasi pajak daerah yang terintegrasi dengan keuangan daerah	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan dan Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sedang dilaksanakan
10	Meningkatkan efektivitas penagihan dan pemeriksaan pajak daerah	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan dan Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sedang dilaksanakan
11	Mengusulkan penambahan tenaga teknis penelaah keberatan pajak daerah	Surat Menyurat	Sekretaris	Juli	Juli	Sudah dilaksanakan

12	Mengusulkan penambahan tenaga teknis pemeriksa pajak daerah yang berkompeten	Surat Menyurat	Sekretaris	Juli	Juli	Sudah dilaksanakan
13	Monev OPD Penghasil secara berkala	Surat Menyurat dan Koordinasi	Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sedang dilaksanakan

## E. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan

Formulir Kertas Kerja							
Penilaian Atas Kegiatan Pengendalian Yang Ada Dan Masih Dibutuhkan							
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian		2024					
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan		Keuangan dan Pendapatan					
Dinas Terkait		Badan Pendapatan Daerah					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:							
1	Tidak Tercapainya Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	RSO.24.37.08.01	Studi banding ke pemerintah daerah lain yang telah sukses dalam pengelolaan pendapatan daerah	Potensi SDA pmda lain dengan potensi daerah kita berbeda jadi kemungkinan penanganan	Optimalisasi Sumber-Sumber PAD	Kepala Badan	Triwulan I (Januari-Maret 2024)
Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan Daerah:							
1	Rendahnya Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	ROO.24.37.08.01	Peningkatan Efektivitas Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	W/P masih kurang sadar akan kewajiban perpajakannya dan penagihan tidak optimal	Sosialisasi pajak dan retribusi daerah secara berkala dan monev OPD penghasil secara berkala	Kepala Bidang	Semester I (Januari-Juni 2024)
2	Penetapan target pajak daerah tidak sesuai dengan potensi yang ada	ROO.24.37.08.02	Identifikasi permasalahan dalam pemungutan pajak daerah dan mengkaji ulang potensi pajak daerah	Potensi tidak tergali secara optimal	Menghitung ulang potensi pajak daerah dan melakukan pendataan objek-objek pajak baru	Kepala Bidang	Tribulan I (Januari-Maret 2024)
3	Data potensi pajak daerah tidak tersusun secara akurat	ROO.24.37.08.03	Memperbarui data potensi pajak daerah secara berkala	Terdapat data acak karena terdapat virus pada aplikasi data potensi pajak daerah	Pengembangan aplikasi potensi pajak daerah	Kepala Bidang	Tribulan I (Januari-Maret 2024)
4	Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya	ROO.24.37.08.04	Mengadakan sosialisasi secara berkala baik melalui media cetak maupun elektronik	Sosialisasi tidak berjalan dengan lancar	Peningkatan Efektivitas Penagihan dan Pemeriksaan Pajak bekerjasama dengan instansi terkait	Kepala Bidang	Semester I (Januari-Juni 2024)
5	Tidak tersedianya sarana dan prasarana pajak daerah/blanko SPTPD	ROO.24.37.08.05	Penyediaan sarana prasarana pajak daerah dalam jumlah yang cukup	Sarana dan prasarana pajak tersedia cukup namun banyak salah	Menyusun jadwal penyediaan sarana dan prasarana secara tepat	Kepala Bidang	Tribulan I (Januari-Maret 2024)
6	Database pajak daerah yang tersusun belum akurat	ROO.24.37.08.06	Mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan pendataan pajak daerah	Anggaran tidak teresap secara optimal dan tenaga teknis pendataan yang tidak mencukupi	Mengoptimalkan penyediaan sarana dan mengusulkan penambahan tenaga teknis pendataan pajak daerah	Kepala Bidang	Tribulan I (Januari-Maret 2024)
7	Hasil Penilaian Objek Pajak belum menggambarkan kondisi riil di lapangan	ROO.24.37.08.07	Bekerja sama dengan perangkat desa dalam melaksanakan penilaian di lapangan	Tenaga teknis Penilai PBB lapangan tidak mencukupi	Mengusulkan penambahan tenaga teknis Penilai PBB	Kepala Bidang	Tribulan 4 (Oktober-Desember 2024)
8	Sistem pelayanan pajak online terhambat	ROO.24.37.08.08	Pemeliharaan aplikasi secara berkala	Sistem aplikasi terkena virus dan sering trouble	Melakukan backup data pajak daerah	Kepala Bidang	Setiap Bulan (Januari-Desember 2024)
9	Keterlambatan update data perkembangan penerimaan pajak daerah	ROO.24.37.08.09	Rekonsiliasi pajak dengan Bank Jatim dan BPKAD	Rekonsiliasi penerimaan pajak belum terintegrasi antara Bank Jatim dan BPKAD	Pengembangan aplikasi pajak daerah yang terintegrasi dengan keuangan daerah	Kepala Bidang	Tribulan 3 (Juli-September 2024)
10	Tidak terpenuhinya target penerimaan pajak	ROO.24.37.08.10	Pemasangan alat perekam transaksi atau tapping box, pengadaannya bekerjasama dengan	Terdapat wajib pajak yang secara sengaja mencabut pemasangan alat tapping box	Meningkatkan efektivitas penagihan dan pemeriksaan pajak daerah	Kepala Bidang	Setiap Bulan (Januari-Desember 2024)
11	Keterlambatan proses penanganan keberatan dan pengurangan	ROO.24.37.08.11	Mengadakan bimtek penelaah keberatan pajak daerah	SDM teknis penelaah keberatan pajak yang berkualitas belum mencukupi	Mengusulkan penambahan tenaga teknis penelaah keberatan pajak daerah	Kepala Bidang	Tribulan 3 (Juli-September 2024)
12	Pelaksanaan pemeriksaan pajak terhambat	ROO.24.37.08.12	Mengadakan bimtek pemeriksaan pajak daerah	SDM pemeriksa pajak yang berkualitas tidak tercukupi	Mengusulkan penambahan tenaga teknis pemeriksa pajak daerah yang berkompeten	Kepala Bidang	Tribulan 3 (Juli-September 2024)
13	Keterlambatan update data perkembangan penerimaan retribusi daerah	ROO.24.37.08.13	Rekonsiliasi penerimaan dengan OPD Penghasil setiap bulan	Rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah tidak berjalan lancar	Monev OPD Penghasil secara berkala	Kepala Bidang	Setiap Akhir Tribulan (Maret, Juni, September dan Desember 2024)

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kesuksesan pengendalian risiko startegis dan operasional OPD salah satunya dipengaruhi oleh faktor informasi dan komunikasi. Faktor informasi dan komunikasi diperlukan dalam penyampaian risiko strategis dan operasional serta rencana tindak pengendalian dalam menangani terjadinya risiko dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Lamongan. Berikut akan dijabarkan mengenai rancangan informasi dan komunikasi yang telah disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan ke dalam matriks sebagai berikut :

Formulir Kertas Kerja Pengkomunikasian Pengendalian Yang Dibangun							
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian		2024					
Tujuan Strategis Pemda							
Urusan Pemerintahan		Keuangan dan Pendapatan					
Dinas Terkait		Badan Pendapatan Daerah					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:							
1	Optimalisasi Sumber-Sumber PAD	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Wajib Pajak dan Staf Bidang Perencanaan dan Penetapan	Maret 2024	Maret 2024	Sudah dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan Daerah:							
1	Sosialisasi pajak dan retribusi daerah secara berkala dan monev OPD penghasil secara berkala	Media cetak maupun elektronik dan rapat koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan, dan Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Wajib Pajak dan OPD Penghasil Retribusi	Setiap Bulan	Setiap Bulan	Sedang dilaksanakan
2	Menghitung ulang potensi pajak daerah dan melakukan pendataan objek-objek pajak baru	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Wajib Pajak dan Staf Bidang Perencanaan dan Penetapan	Setiap Triwulan	Setiap Triwulan	Sedang dilaksanakan
3	Pengembangan aplikasi potensi pajak daerah	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Wajib Pajak dan Staf Bidang Pelayanan dan Penagihan	Setiap Bulan	Setiap Bulan	Sedang dilaksanakan
4	Peningkatan Efektivitas Penagihan dan Pemeriksaan Pajak bekerjasama dengan instansi terkait	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Wajib Pajak	Januari-Desember	Januari-Desember	Sedang dilaksanakan
5	Menyusun jadwal penyediaan sarana dan prasarana secara tepat	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Pihak Penyedia Sarana Prasarana	Setiap Triwulan	Setiap Triwulan	Sedang dilaksanakan
6	Mengoptimalkan penyerapan anggaran dan mengusulkan penambahan tenaga teknis pendataan pajak daerah	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Sekretaris	BKPSDM dan BPKAD	Oktober	Oktober	Akan dilaksanakan
7	Mengusulkan penambahan tenaga teknis Penilai PBB	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Sekretaris	BKPSDM	Juli	Juli	Sudah dilaksanakan
8	Melakukan backup data pajak daerah	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Staf Pelayanan	Januari-Desember	Januari-Desember	Sedang dilaksanakan
9	Pengembangan aplikasi pajak daerah yang terintegrasi dengan keuangan daerah	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan dan Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Staf Bidang Pelayanan dan Penagihan dan Staf Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Januari-Desember	Januari-Desember	Sedang dilaksanakan
10	Meningkatkan efektivitas penagihan dan pemeriksaan pajak daerah	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan dan Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Wajib Pajak	Januari-Desember	Januari-Desember	Sedang dilaksanakan
11	Mengusulkan penambahan tenaga teknis penelaah keberatan pajak daerah	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Sekretaris	BKPSDM	Juli	Juli	Sudah dilaksanakan

12 Mengusulkan penambahan tenaga teknis pemeriksa pajak daerah yang berkompeten	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Sekretaris	BKPSDM	Juli	Juli	Sudah dilaksanakan
13 Monev OPD Penghasil secara berkala	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	OPD Penghasil	Januari-Desember	Januari-Desember	Sedang dilaksanakan

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Pengendalian dan pemantauan risiko merupakan salah satu faktor dalam penentuan keberhasilan sebuah organisasi dalam pelaksanaan tugas serta pencapaian target dan kinerja organisasi perangkat daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas dalam urusan pendapatan daerah, guna mengendalikan dan menghadapi risiko-risiko yang diidentifikasi dalam pencapaian tujuan organisasi maka disusun sebuah rancangan pemantauan yang dapat kami jabarkan melalui matriks tabel sebagaimana berikut :

Formulir Kertas Kerja						
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern						
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan				
Tahun Penilaian		2024				
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan		Keuangan dan Pendapatan				
Dinas Terkait		Badan Pendapatan Daerah				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Pendapatan Daerah:						
1	Optimalisasi Sumber-Sumber PAD	Rapat Koordinasi	Kepala Badan	Maret	Maret	Sudah dilaksanakan
Risiko Operasional OPD Badan Pendapatan Daerah:						
1	Sosialisasi pajak dan retribusi daerah secara berkala dan movev OPD penghasil secara berkala	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sedang dilaksanakan
2	Menghitung ulang potensi pajak daerah dan melakukan pendataan objek-objek pajak baru	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sedang dilaksanakan
3	Pengembangan aplikasi potensi pajak daerah	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sedang dilaksanakan
4	Peningkatan Efektivitas Penagihan dan Pemeriksaan Pajak bekerjasama dengan instansi terkait	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan dan Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sedang dilaksanakan
5	Menyusun jadwal penyediaan sarana dan prasarana secara tepat	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Setiap Triwulan	Setiap Triwulan	Sedang dilaksanakan
6	Mengoptimalkan penyerapan anggaran dan mengusulkan penambahan tenaga teknis pendataan pajak daerah	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Sekretaris	Oktober	Oktober	Sedang dan akan dilaksanakan
7	Mengusulkan penambahan tenaga teknis Penilai PBB	Surat Menyurat	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan	Juli	Juli	Sudah dilaksanakan
8	Melakukan backup data pajak daerah	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sedang dilaksanakan
9	Pengembangan aplikasi pajak daerah yang terintegrasi dengan keuangan daerah	Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan dan Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sedang dilaksanakan
10	Meningkatkan efektivitas penagihan dan pemeriksaan pajak daerah	Surat Menyurat dan Rapat Koordinasi	Kepala Bidang Pelayanan dan Penagihan dan Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sedang dilaksanakan
11	Mengusulkan penambahan tenaga teknis penelaah keberatan pajak daerah	Surat Menyurat	Sekretaris	Juli	Juli	Sudah dilaksanakan

12 Mengusulkan penambahan tenaga teknis pemeriksa pajak daerah yang berkompeten	Surat Menyurat	Sekretaris	Juli	Juli	Sudah dilaksanakan
13 Monev OPD Penghasil secara berkala	Surat Menyurat dan Koordinasi	Kepala Bidang Pengawasan dan Pelaporan	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Setiap Bulan (Januari-Desember)	Sedang dilaksanakan

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Dari hasil yang telah dijabarkan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan telah menyusun dokumen dalam pengelolaan risiko sesuai dengan kaidah dan semoga dokumen penilaian risiko tahun 2024 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai panduan dalam identifikasi, pemantauan, pengendalian risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD dalam urusan pendapatan daerah di Kabupaten Lamongan.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN**



**PUJO BROTO IRIAWAN PUTRA, SE, MM, M.Kes.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19691008 199503 1 003